

DESKRIPSI HKI

Karya ini membahas penanganan tersangka Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan. Kajian ini berangkat dari pentingnya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, keamanan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam proses penanganan tersangka. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan penanganan tersangka KKB oleh aparat kepolisian, khususnya anggota Brimob, dengan memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan tersangka KKB harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, prinsip proporsionalitas, penggunaan kekuatan secara terukur, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kajian juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, antara lain munculnya persepsi publik, trauma historis terhadap aparat keamanan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penanganan kelompok separatis. Karya ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai pentingnya penegakan hukum yang tetap menjunjung perlindungan HAM dan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Rudi Sudarto dan Sukarman Dj Sumarno, *Pendekatan Humanis Merebut Hati Papua*, Serat Alam Media, Jakarta, 2022
- Hasil Wawancara dengan Anggota Brimob pada Januari 2026.
- Komnas HAM. 2019. Pelatihan Dasar HAM bagi 150 Anggota Satuan BRIMOB di Papua. [https:// www. komnasham. go.id/ index.php/ news/2017/ 10/19/ 426/pelatihandasar-ham-bagi-150-anggota-satuanbrimob-papua.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/19/426/pelatihandasar-ham-bagi-150-anggota-satuanbrimob-papua.html), di akses Pada Januari 2026 Pukul 13.20 WIB.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian.
- Perkap Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli.
- Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
- Rencana Operasi Damai Cartenz-2022 Nomor:R/RENOPS/1/I/OPS.1.3./ 2022, Polda Papua, Jayapura.
- Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.